

Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat PDRB Provinsi Sulawesi Barat

Abdul Rajab^{1✉}, Muchtar²

¹Universitas Muhammadiyah, Mamuju.

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra, Makassar.

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh secara simultan belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat dan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh secara parsial belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat. Teknik Pengolahan dalam penelitian ini, yaitu Uji Asumsi Klasik, analisis regresi linear berganda melalui Uji Normalitas Data, uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²), uji F Statistika dan uji T Statistik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat dinyatakan bahwa hasil uji F dan uji T, dimana variabel independen yang ada yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal, secara bersama-sama antara variabel pendapatan asli daerah (X1) dan variabel belanja modal (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto (Y). Sedangkan dalam pengujian secara parsial atau uji secara sendiri-sendiri melalui uji T yang dilakukan, diperoleh hasil yang berbeda dimana dari dua variabel bebas yang ada yaitu pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2) hanya pendapatan asli daerah saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto sedangkan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

Kata kunci: Belanja modal; PAD; PDRB

The influence of capital expenditures and regional original income on GRDP level of West Sulawesi Province

Abstract

The aim of the study was to find out how capital expenditure and regional original income simultaneously influence the PDRB of West Sulawesi Province and to find out how capital expenditure and regional original income partially influence the GRDP of West Sulawesi Province. Processing techniques in this study, namely the Classical Assumption Test, multiple linear regression analysis through the Data Normality Test, Multicollinearity test, Heteroskedastisity test. Correlation Coefficient Test (R) and Determination (R²), Statistical F test and Statistical T test. Based on the results of the analysis that has been carried out by the researcher, it can be stated that the results of the F test and T test, where the independent variables are local original income and capital expenditure, are jointly between the regional original income variable (X1) and the capital expenditure variable (X2).) has a significant effect on gross regional domestic product (Y). Whereas in partial testing or testing individually through the T test conducted, different results are obtained where of the two independent variables that exist, namely local original income (X1) and capital expenditure (X2) only regional original income has the same effect. significant effect on gross regional domestic product, while capital expenditures do not have a significant effect on gross regional domestic product..

Key words: Capital expenditures; PAD; GRDP

PENDAHULUAN

Salah satu petunjuk penting untuk melihat dampak dari perbaikan moneter suatu daerah adalah perkembangan keuangan. Penilaian ini digunakan untuk mengukur tingkat-tingkat perkembangan hasil dalam suatu perekonomian. Lebih jauh lagi, penunjuk ini sangat membantu dalam pemberian tanda tentang sejauh mana pergerakan moneter selama periode tertentu setelah menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah dari masyarakat setempat atau penduduk yang menjadi tanggungjawab pemerintah setempat.

Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan yang mandiri di Indonesia bagi daerah yang dianggap mampu untuk mandiri maka pemerintah tentu akan memberikan persetujuan dalam pembentukan daerah otonomi yang baru tersebut sebab hal ini sudah diatur dalam peraturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang khususnya peraturan yang mengatur mengenai pembentukan daerah yang otonom. Pemberian hak otonom kepada daerah yang dianggap mampu untuk mandiri tentunya diharapkan dapat mengembangkan wilayahnya baik dari sisi ekonomi, pemerintahan, pelayanan publik, layanan kesehatan, pendidikan juga penyediaan lapangan kerja yang pada akhirnya kesemuanya itu akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Melalui penyertaan ini, pemerintahan yang di daerah serta segala yang berada dalam lingkungan pemerintahannya untuk dapat mempermudah penanganan semua asset yang diklaim provinsi untuk dimanfaatkan secara terbuka manfaatnya di kabupaten yang nantinya hasilnya dapat dibagi antara pemerintah daerah dan provinsi tentunya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dan memiliki status hukum yang tetap dan telah disepakati bersama pihak yang terkait.

Untuk mengukur bagaimana kondisi ekonomi suatu daerah maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah melalui pengamatan terhadap nilai PDRB yang ada pada daerah tersebut, meningkat atau menurun setiap tahunnya itu hanya akan diketahui jika dilakukan perhitungan sesuai dengan aturan yang diberlakukan dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah yang biasanya diukur dalam rentang waktu tertentu itu.

Peningkatan PDRB suatu daerah tidak lepas dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta sangat tergantung juga dari seberapa besar proporsi pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Untuk pemasukan pemerintah dari pendapatan asli daerah yang ada tentu semakin tinggi akan semakin bagus karena akan semakin banyak yang akan dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah daerah sehingga akan mempengaruhi dari sisi permintaan akan barang maupun jasa sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada peningkatan aktifitas para pelaku usaha dalam menyediakan kebutuhan masyarakat baik itu barang yang meningkat maupun peningkatan dari permintaan jasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen.

Tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulawesi Barat Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) tahun 2015-2019.

Tahun	PDRB
2015	25.964.432.14
2016	27.524.767.06
2017	29.282.487.06
2018	31.111.346.93
2019	32.873.531.52

Dari data awal yang diperoleh pada BPS Provinsi Sulawesi Barat pada tabel 1 yang memberikan gambaran dimana terjadi peningkatan PDRB sebagaimana yang ada pada tahun 2015 nilai PDRB sebesar Rp 25.964.432.14, nilai ini untuk tahun selanjutnya sudah terjadi perubahan yakni ditahun 2016 bertambah menjadi Rp 27.524.767,06. Trend peningkatannya pun berlanjut pada tahun selanjutnya dimana masih mengalami peningkatan dimana nilai yang didapatkan sudah menjadi lebih besar dimana ditahun 2017 mengalami peningkatan lagi menjadi Rp 29.282.487,06, pada tahun 2018 nilai PDRB meningkat lagi menjadi Rp 31.111.346,93 dan dimana ditahun 2019 terjadi pertambahan nilai sehingga yang diperoleh menjadi Rp 32.873.531,52. Maka dapat dijelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya mendapatkan peningkatan PDRB yang cukup signifikan peningkatannya. Hal ini merupakan bahwa setiap tahunnya semakin meningkat produksi barang dan jasa yang ada, hal ini terjadi karena permintaan masyarakat maupun pemerintah yang juga semakin meningkat belanjanya.

Definisi tentang penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara atau daerah selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per-kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibanding periode sebelumnya, maka Negara atau daerah tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi namun justru kemunduran ekonomi”.

Pertumbuhan ekonomi yang ada dalam daerah dapat dihitung melalui cara menggunakan secara keseluruhan indikator penunjang PDRB, dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa diukur melalui perhitungan dengan formula rumus pertumbuhan seperti ini:

$$R(t-1, t) = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%)
PDRB_t = produk domestik regional bruto pada tahun t
PDRB_{t-1} = produk domestik regional bruto pada tahun sebelumnya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sebagaimana yang maksud oleh Sjafrizal (2016:181) PDRB adalah pada dasarnya adalah informasi dan data penting tentang pengelolaan keuangan suatu daerah. Secara otorisasi mandiri, PDRB pada dasarnya adalah nilai lengkap dari penciptaan tenaga kerja dan produk yang diberikan setiap sektor di suatu ruang dalam periode tertentu. Saat ini, informasi PDRB tersebut dapat diakses hampir di seluruh wilayah-wilayah, dan masyarakat baik perkotaan maupun daerah pedesaan di Indonesia yang didistribusikan oleh BPS terdekat secara konsisten yang senantiasa dipublikasikan untuk dapat diakses oleh masyarakat umum. Pemeriksaan dan penataan perbaikan yang terkait dengan ekonomi lokal, seperti desain ekonomi lokal, perkembangan keuangan dan tingkat keberhasilan lokal, pada umumnya menggunakan PDRB ini sebagai informasi dan data fundamental yang kadang sering dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan selanjutnya, juga bagi masyarakat akademisi sering memanfaatkan data dari BPS ini sebagai bagaian dalam pengambilan data untuk dioleh sebagai bahan untuk penelitian yang diperlukan.

Menurut BPS, produk domestik regioanl bruto (PDRB) adalah nilai lengkap dari penciptaan tenaga kerja dan produk yang diberikan oleh setiap wilayah administrasi di kabupaten/kota pada wilayah yang ada pada baik secara daerah maupun untuk skala provinsi tertentu dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun masa perhitungan penilaian PDRB yang ada pada setiap negara atau wilayah. Produk Domestik Regioanl Bruto seperti yang ditunjukkan oleh Suparmoko (2006: 31) adalah catatan nilai absolut dari tenaga kerja dan produk konklusif yang diciptakan oleh ekonomi lokal biasa/lokal/kota selama satu tahun. Nilai produk domestik regioanl bruto yang diperoleh pada suatu ruang memang tidak bisa dibedakan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua bidang pergerakan moneter/bidang usaha di dalam wilayah teritorial yang sama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut aturan pemerintah yang tertuang dalam perundang-undangan yang ada pada UUD No. 32 tahun 2004 yang mengatur mengenai asal pembentukan PAD itu sendiri yang terdiri: “Hasil pajak pada daerah yang masuk wajib kena pajak daerah, Hasil dari pungutan retribusi pada daerah yang telah ditentukan besarnya oleh masing-masing daerah, Hasil dari usaha daerah yang merupakan perusahaan yang dimiliki daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana pendapatan dari usaha ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, Penerimaan yang sah sesuai undang-undang dari dinas dan lain-lain pendapatan yang ada di daerah yang sah”.

Untuk pendapatan asli daerah “dapat dijelaskan sebagai pendapatan daerah dari berbagai upaya pemerintah baik provinsi dan daerah untuk mengumpulkan aset untuk kebutuhan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan, yang terdiri dari sumber-sumber pendapatan daerah yang sah secara undang-undang yang pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan apa yang menjadi perencanaan bagi pemerintah daerah setempat juga merupakan bagian dari optimalisasi potensi daerah yang ada. Pendapatanin dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang sah”.

Belanja Modal

Setiap pemerintah akan membeli barang maupun jasa maka perlu menetapkan suatu kebijakan untuk membiayai kebutuhan pembelian barang maupun jasa tersebut yang biasa disebut sebagai belanja modal sebab pemerintah memerlukan modal dalam menjelankan pemerintahannya. Belanja modal ini telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangannya, hal bisa saja dikarenakan sudah ada pergeseran yang dimana pemerintah perlu melakukan penyesuaian dalam menentukan yang mana saja yang perlu dijadikan atau dikelompokkan menjadi belanja modal sehingga dalam penyusunan anggaran dapat disesuaikan dengan peraturan yang ada atau yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 71 tahun 2010, dengan mengacu pada penjelasan yang ada pada PP diatas maka Belanja Modal dapat dikelompokkan menjadi 5 bentuk kelompok yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran penggunaan atau pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh, mengamankan atau menyelesaikan perpindahan hak dan sewa tanah, pembersihan, penataan, peremajaan, pengembangan tanah, pengesahan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengadaan hak atas tanah sampai tanah dirujuk dalam kondisi yang dapat diterima dan siap untuk digunakan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Perubahan Penggunaan modal dan mesin adalah pengeluaran konsumsi atau pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh, perluasan atau penggantian dan perluasan dalam modal dan mesin serta persediaan atau sumber daya kantor yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode pembukuan (setahun) sampai dengan peralatan dan perlengkapan tersebut. dirujuk berada dalam kondisi yang dapat diterima dan siap untuk digunakan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Penggunaan Modal pada bangunan dan gedung adalah pengeluaran konsumsi atau pengeluaran yang digunakan untuk perolehan, perluasan atau penggantian, termasuk penggunaan bangunan yang baik, mengurus dan menangani pembangunan infrastruktur gedung -gedung serta menambah kapasitas atau perluasan gedung dalam keadaan siap pakai dengan kondisi yang layak pakai.

Belanja Modal untuk Jalan, irigasi dan jaringan

Konsumsi Modal untuk Jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran penggunaan atau pengeluaran yang digunakan untuk perolehan, penggantian, peningkatan, pengembangan, perakitan dan pemeliharaan, termasuk penggunaan untuk mengatur, mengamati dan menangani jalan yang diusulkan, sistem air dan organisasi dalam persiapan untuk menggunakan kondisi barang tersebut dalam keadaan baik.

Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran penggunaan atau pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh, perluasan, penggantian, peningkatan kemajuan, perakitan dan dukungan aktual lainnya yang tidak dapat dipesan dalam Penggunaan Modal Tanah, Penggunaan Modal Perangkat Keras dan Peralatan, Penggunaan Modal Bangunan dan Gedung, dan Penggunaan untuk Modal Sistem Air Modal, Jalan, dan Organisasi. Belanja Modal Fisik Lainnya juga mencakup Penggunaan Modal untuk kontrak, sewa beli, perolehan barang kreatif, produk arkeologi dan produk untuk galeri, makhluk, hewan dan tumbuhan, buku, dan buku harian logis, yang semuanya dilakukan oleh otoritas publik sebagai bentuk pemerintahan kehadiran pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas jadi dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dalam melaksanakan fungsinya yang diharapkan belanja ini juga dapat memberikan dampak yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat selain dari belanja ini juga merupakan belanja yang didalamnya juga terdapat investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi selain untuk memperoleh keuntungan bagi pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat dimana semakin tinggi kesejahteraan masyarakat maka semakin besar pula kebutuhan masyarakat tersebut yang tentu akan berdampak terhadap kebutuhan barang dan jasa sebagai kebutuhan hidup mereka.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana hasil analisis yang diperoleh dapat didiskripsikan atau diutarakan lebih jelas lagi berdasarkan hasil olah data menggunakan analisis regresi linier berganda dimana dalam analisis ini akan dicari tahu hubungan yang dapat ditimbulkan dari dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dengan hasil yang diperoleh nantinya inilah yang akan dijelaskan lebih dalam lagi apakah hubungan yang diperoleh oleh variabel bebas dengan variabel terikat seperti apa hasilnya tentu harus melihat output dari SPSS yang diolah. Sehingga nantinya akan ada hasil hubungan antara variabel apakah signifikan, hubungannya kuat atau sebagainya.

Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linier berganda yang merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen biasa juga disebut variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y) atau biasa juga disebut variabel terikat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Belanja Modal (X_2) terhadap PDRB (Y) yang dimasukkan dalam bentuk fungsi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen
- X_1 dan X_2 = Variabel independen
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

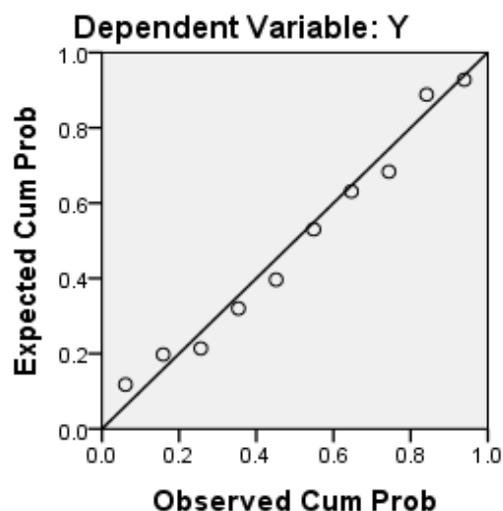
Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji analisis uji t maupun uji f maka terlebih dahulu kita melakukan uji asumsi klasik yang akan mengukur sejauh mana data yang akan diolah, apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini beberapa bagian dari uji asumsi klasik.

Uji Normalitas Data

Pada tahap ini dilakukan uji normalitas data dimana peneliti sebelum melakukan uji data lebih jauh maka data yang akan diolah terlebih dahulu dilakukan uji normalitas yaitu untuk mengukur apakah data yang didapatkan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan melihat normalitas data itu sendiri jika hasilnya menyatakan normal atau layak diuji lebih jauh maka peneliti dapat melakukan tahap selanjutnya namun jika tidak normal maka peneliti sebaiknya melakukan pengambilan data ulang. Berikut ini adalah hasil analisis dari uji normalitas yang ada pada gambar 1 berikut ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1.
Hasil Uji Normalitas

Dari hasil analisis diatas maka terlihat bahwa semua titik yang ada itu menyebar mengikuti garis lurus yang ada dan tidak membentuk pola tertentu maka dianggap memiliki residual yang masuk kategori normal sehingga data yang diperoleh ini dapat dikatakan memenuhi syarat kenormalan suatu data atau layak dan dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya.

Uji Multikolinieritas

Dalam uji peneliti ingin mengetahui apakah terjadi atau tidaknya korelasi antar variabel bebas yang diuji pada penelitian ini sebab jika terjadi korelasi maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebasnya kurang bagus datanya dan sebaiknya hasil uji ini tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Dalam penentuan hasil uji ini untuk mengetahui terdapat atau tidaknya korelasi antar variabel maka harus melihat dari nilai tolerance yang ditetapkan sesuai standar yaitu jika nilai tolerance nya lebih besar dari 0,10 maka tidak terdapat korelasi antar variabel dan jika nilai tolerancenya kurang dari 0,10 maka dapat dikatakan terdapat korelasi antara variabel. Berikut ini adalah tabel 2 hasil uji multikolinieritas

Tabel 2.
 Hasil Uji Multikolinieritas
 Coefficients

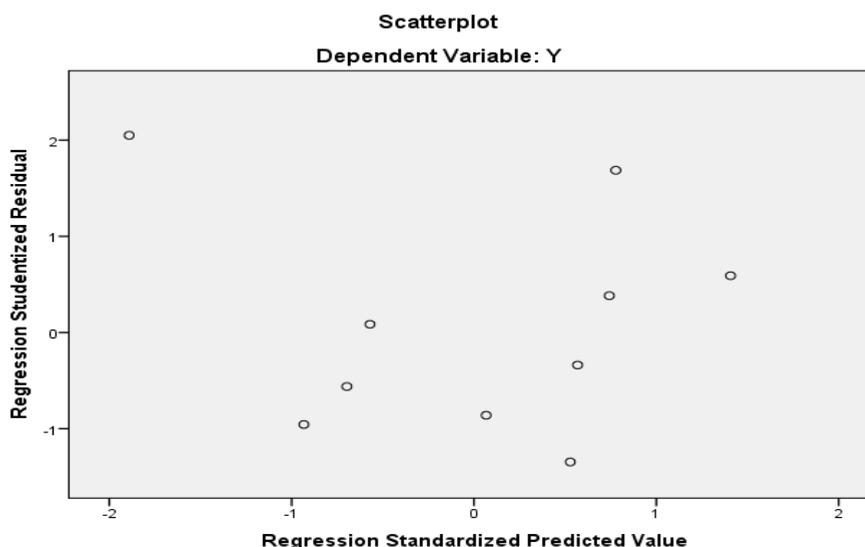
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	14935525.427	1270472.968		11.756	.000	
1	X1	.046	.007	.965	6.552	.000	.399
	X2	.000	.006	.005	.036	.972	.399

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pada tabel 2 diketahui bahwa nilai tolerance pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0.399, dan nilai tolerance pada variabel Belanja Modal (X2) sebesar 0.399, maka nilai tolerance yang diperoleh pada semua variabel bebas lebih besar dari 0.10 sehingga untuk pengukuran nilai tolerance nya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pada uji ini perlu dilakukan Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada uji ini melihat ada atau tidaknya ketidaksamaan heteroskedastisitas adalah dengan melihat titik-titik yang dihasilkan, bila suatu titik membentuk pola tertentu seperti gelombang dan dan sebagaimana maka dapat dikatakan terdapat heterosdisitas namun jika tidak terbentuk suatu pola tertentu maka tidak terdapat heterosdisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:



Gambar 2.
 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 diatas, menunjukkan hasil bahwa data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah atau keraguan heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear

Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk menerangkan keeratan hubungan antara 2 variabel independen pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap variabel dependen produk domestik regional bruto Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menerangkan seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap variabel dependen produk domestik regional bruto. Perolehan nilai R dan R² dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.969a	.939	.922	1465512.21393

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil tabel 3 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa besarnya koefisien korelasi (R) sebesar 0.969 termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat dimana untuk rentang 0,80-1,00 yang menunjukkan bahwa korelasi antara variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Sulawesi Barat sebesar 96,9% dan sisanya sebesar 3,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini oleh peneliti. Adapun untuk koefisien determinasi (R²) sebesar 0.939 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap produk domestik regional bruto terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi barat yaitu 93,9% dan sisanya 6,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pada uji diatas telah dilakukan uji asumsi klasik dimana dalam penelitian yang menggunakan regresi linier berganda perlu melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan uji tahap selanjutnya. Dari hasil uji asumsi klasik yang dilakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa data yang ingin diolah tidak terdapat masalah atau data yang ingin diolah lebih jauh lagi sudah layak dan memenuhi syarat-syarat data yang baik. Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis yaitu untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang disimpulkan oleh peneliti apakah terdapat kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan dugaan sementara yang disimpulkan. Pengujian hipotesis terhadap hasil regresi yang diperoleh dilakukan pengujian secara serempak pada uji F dan pengujian secara parsial pada uji t. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Uji F (Uji Serempak)

Pengujian pada uji F ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikatnya apakah masuk kategori signifikan atau tidak signifikan. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada taraf signifikansi 0.05. Uji F mempunyai pengaruh signifikan apabila F hitung > F tabel dengan nilai probabilitas kesalahan lebih kecil dari 0.05 (5%). Berikut hasil uji F dalam penelitian ini:

Tabel 4.
Hasil Uji F
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	232795930553462.530	2	116397965276731.270	54.196	.000b
	Residual	15034082344339.082	7	2147726049191.297		
	Total	247830012897801.620	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki nilai F hitung sebesar 54,196 dengan tingkat signifikansi 0.000. Sedangkan nilai F tabel dapat kita cari dengan menggunakan rumus $F_{tabel} = (k; n-k)$ dimana $k=2$ dan $n=10$, selanjutnya nilai ini kita masukkan dalam rumus $F_{tabel} = 2; 10-2, = 2; 8$. Angka inilah kemudian yang dijadikan dasar untuk mencari nilai pada F tabel, maka diperoleh nilai sebesar 4.46. Oleh karena nilai F hitung $> F_{tabel}$ yaitu $54,196 > 4.46$ dengan nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari < 0.05 , maka dapat dinyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.

Uji t (Uji Parsial)

Pengujian melalui cara uji T ini sebenarnya dilakukan untuk mengetahui secara sendiri-sendiri pengaruh yang dapat diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikatnya apakah semua variabel bebas memiliki nilai yang signifikan pengaruhnya atau ada variabel bebas yang tidak memiliki nilai yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Dalam pengujian ini perlu melakukan perbandingan dengan melihat tingkat signifikansi yang ditentukan dengan nilai 0,05.

Pengujian terhadap uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung $> t$ tabel dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 (5%). Adapun hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji t
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.935	127.968		11.756	.000
X1	.046	.007	.965	6.552	.000
X2	.024	.006	.005	.036	.972

a. Dependent Variable: Y

Hasil pengujian secara parsial pada tabel 5 dapat diuraikan sebagai berikut:

Uji t pertama adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah (X1) terhadap produk domestik regional bruto (Y).

Berdasarkan nilai signifikan (Sig.)

Berdasarkan nilai yang dihasilkan pada output SPSS Coefficients pada tabel 5 diatas, maka diperoleh nilai sig. sebesar 0.000. Karena nilai sig. 0.000 lebih kecil dari $< probabilitas 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di terima atau terdapat pengaruh signifikan pendapatan asli daerah (X1) terhadap produk domestik regional bruto (Y).

Perbandingan nilai t hitung dengan t tabel

Berdasarkan nilai yang dihasilkan pada output SPSS diperoleh nilai t hitung variabel pendapatan asli daerah (X1) adalah sebesar 6.552 sedangkan nilai pada t tabel yang diperoleh dari ($df= n-k, sig=0.05$) sebesar 1.859, dari hasil analisis dimana nilai t hitung $6.552 > t$ tabel 1.859 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto yang ada pada Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini bisa saja diakibatkan bahwa pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi barat yang diperoleh meningkat seiring dengan makin meningkatnya pula kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat yang yang tentu akan berdampak terhadap semakin besarnya juga potensi pendapatan daerah yang bisa didapatkan.

Uji t kedua untuk mengetahui apakah ada pengaruh belanja modal (X2) terhadap produk domestik regional bruto (Y).

Berdasarkan nilai signifikan (Sig.)

Berdasarkan nilai yang dihasilkan pada output SPSS Coefficients pada tabel 5 diatas, maka diperoleh nilai sig. sebesar 0.972. Karena nilai sig. 0.972 lebih besar dari $> probabilitas 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di tolak atau tidak ada pengaruh belanja modal (X2) terhadap produk domestik regional bruto (Y).

Perbandingan nilai t hitung dengan t tabel

Berdasarkan nilai yang dihasilkan pada output spss diperoleh nilai t hitung variabel belanja modal (X2) adalah sebesar 0.036 sedangkan nilai pada t tabel yang diperoleh dari (df= n-k, sig=0.05) sebesar 1.859, dari hasil analisis dimana nilai t hitung $0.036 < t \text{ tabel } 1.859$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh variabel belanja modal terhadap produk domestik regional bruto yang ada pada Provinsi Sulawesi Barat. Hal mungkin dapat membuat sehingga belanja modal ini tidak berpengaruh signifikan karena belanja modal hanya berorientasi pada pembelian asset daerah maupun perawatan asset daerah yang secara langsung tidak begitu berhubungan terhadap kegiatan konsumsi barang maupun jasa secara langsung.

Berdasarkan hasil uji F dan uji T diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel independen yang ada yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal, maka yang berdasarkan uji secara simultan atau uji F maka dapat diketahui bahwa secara bersama-sama antara variabel pendapatan asli daerah (X1) dan variabel belanja modal (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto (Y) yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan dalam pengujian secara parsial atau uji secara sendiri-sendiri melalui uji T yang dilakukan, diperoleh hasil yang berbeda dimana dari dua variabel bebas yang ada yaitu pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2) hanya pendapatan asli daerah saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto sedangkan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

Hasil pengujian melalui SPSS seperti output pada tabel 5 dapat menjelaskan mengenai persamaan regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier yang diperoleh dari hasil output SPSS adalah sebagai berikut:

$$Y = 14.935 + 0.046X_1 + 0.024X_2$$

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta (a) = 14.935, yang artinya bahwa jika nilai variabel yang diteliti yaitu variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal dalam keadaan tetap atau tidak mengalami perubahan nilai, maka nilai produk domestik regional bruto yang bisa diperoleh pada Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 14.935.

b1 = 0.046, yang artinya bahwa jika variabel pendapatan asli daerah meningkat 1 satuan, maka produk domestik regional bruto akan meningkat sebesar 0.046 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain yang diteliti tidak mengalami perubahan atau dalam kondisi konstan atau tetap.

b2 = 0.024, yang artinya bahwa jika variabel belanja modal meningkat 1 satuan, maka produk domestik regional bruto akan meningkat sebesar 0.024 dengan asumsi bahwa variabel lain yang diteliti tidak mengalami perubahan atau dalam kondisi tetap atau konstan. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui pula bahwa dari kedua variabel independen tersebut, maka variabel pendapatan asli daerah (X1) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap produk domestik regional bruto (Y). Hal ini dikarenakan nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah yang paling besar dibanding variabel belanja modal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat dinyatakan bahwa berdasarkan hasil uji F dan uji T diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel independen yang ada yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal, maka yang berdasarkan uji secara simultan atau uji F maka dapat diketahui bahwa secara bersama-sama antara variabel pendapatan asli daerah (X1) dan variabel belanja modal (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto (Y) yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan dalam pengujian secara parsial atau uji secara sendiri-sendiri melalui uji T yang dilakukan, diperoleh hasil yang berbeda dimana dari dua variabel bebas yang ada yaitu pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2) hanya pendapatan asli daerah saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto sedangkan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya hipotesis yang kedua saja yang tidak tepat sebab hasil olah data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan belanja modal terhadap PDRB di Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi); UPP AMP YKPN, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, 2020. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Barat. BPS, Mamuju.
- Boediono, 1992 Teori Pertumbuhan Ekonomi (Edisi Pertama), BPFE, Yogyakarta.
- Deddi Nordiawan, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Guripno Mangkoesobroto, 2013, Ekonomi Publik (Edisi Ketiga), BPFE, Yogyakarta.
- Gustiana, Andi. 2014. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Universitas Hasanuddin.
- Hamdan Aini. 2001, Perpajakan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lincoln Arsyad. 2010. Ekonomi Pembangunan, Edisi kelima. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Michael Todaro. 2000, Ekonomi Pembangunan Edisi ke 6, Erlangga, Jakarta
- Muda Markus, 2005, Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rajab, A. (2022). Pengaruh belanja tidak langsung terhadap produk domestik regional bruto. AKUNTABEL, 19(1), 33-41.
- Robinson Taringan, 2005, Ekonomi Regional Teori dan aplikasi (edisi revisi), PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sjafrizal, 2016, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Rajawali pers, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2000, Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Suparmoko 2006. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Revisi Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.